

Apa Kabar Korporasi Petani?

OLEH: RAFNEL AZHARI

Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Andalas
Dan Peneliti di PUI Pangan Inklusif Universitas Andalas

SAYA teringat dengan gagasan Presiden Jokowi soal Korporasi Petani. Presiden Jokowi nampaknya mencoba memahami tantangan rumit di sektor pertanian. Presiden ingin ada upaya terobosan dan perubahan paradigma dalam memandang sektor pertanian. Dalam beberapa kesempatan, baik pada rapat terbatas maupun ketika Dies Natalis IPB tahun lalu Presiden Jokowi mengatakan bahwa petani tidak akan bisa sejahtera jika cara kita mengelola sektor pertanian masih sama dengan yang telah berlalu. Maka dari itu Presiden memandang petani yang memiliki produk unggulan sejenis perlu digabungkan dalam satu kesatuan yang besar, diperkuat kelembagaannya dan dapat mengendalikan sendiri proses *on-farm* serta *of-farm* usaha taninya, sehingga dengan demikian nilai tambah dapat ditingkatkan. Gagasan inilah yang disebut Presiden sebagai korporasi petani.

Gagasan korporasi petani ini direspons dengan cepat oleh beberapa kementerian. Dalam beberapa kesempatan Menteri Pertanian menyampaikan bahwa, konsep dan pelaksanaan korporasi petani disiapkan oleh lintas kementerian, yakni: Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian BUMN serta Kementerian Perdagangan. Tahun 2018 ini ditargetkan terealisasi 10 korporasi petani. Beberapa provinsi disebut telah siap untuk petaninya dikorporasikan, yakni: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Bukan Sesuatu yang Baru

Gagasan korporasi petani ini sungguh menarik dan menjadi harapan baru bagi penyelesaian persoalan pertanian. Namun sejatinya bukanlah suatu gagasan yang baru. Ketika era Mohammad Prakosa

menjadi Menteri Pertanian, pernah diluncurkan gagasan yang sama yaitu apa yang disebut pada waktu itu sebagai *Corporate Farming*. Mohammad Prakosa mengeluhkan program-program Kementerian Pertanian yang masih mencerminkan pengelolaan usaha tani sebagai usaha yang individual sehingga tidak efektif ketika menghadapi persaingan yang lebih keras. Sehingga ditegaskanlah upaya untuk mendorong konsolidasi penguasaan lahan usaha tani pada suatu hamparan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan masing-masing petani.

Pada tahun 2009 melalui PT PEN (Padi Energi Nusantara) juga pernah dikembangkan konsep yang hampir serupa. PT PEN pada waktu itu pernah mengkonsolidasi lahan sawah 2.700 hektare di Kabupaten Kerawang, Kabupaten Subang dan Sumedang. Lahan tersebut disiapkan untuk menjadi kawasan agribisnis terpadu komoditas padi Badan Usaha Milik Petani (BUMP). PT PEN pada waktu itu bertindak sebagai induk pengelola BUMP. Dengan konsep dan tujuan yang serupa dengan gagasan Presiden Jokowi sekarang, pemerintah pada saat itu gagal membuat usaha ini menjadi lebih besar bahkan PT PEN akhirnya dilikuidasi.

Tantangan Implementasi

Tantangan kita selalu adalah pada rendahnya kemampuan implementasi berkelanjutan dari sebuah gagasan yang kita miliki. Boleh saja gagasan atau ide kita bagus tetapi kita lebih sering kehilangan kemampuan dan daya juang untuk melaksanakannya. Semua persoalan teknis bisa jadi telah kita hitung,

namun persoalan nonteknis lebih sering menjadi batu sandungan.

Tantangan selanjutnya adalah pada persoalan kultural pertanian itu sendiri. Mengubah cara berpikir petani dari pola pertanian konvensional ke arah pertanian yang terintegrasi sektor hulu dan hilir serta sekaligus secara bertahap memahami bisnis prosesnya dengan baik bukanlah suatu hal yang mudah. Cara pandang bahwa pertanian adalah jalan hidup/ *way of life* masih dipegang oleh sebagian besar petani kita. Di sisi lain sumberdaya manusia (SDM) pertanian dihuni oleh petani dengan usia tua. Hasil sensus pertanian 2013 memperlihatkan bahwa sebagian besar usia petani Indonesia adalah 45-54 tahun bahkan sepertiganya berusia diatas 54 tahun. Selain masalah usia yang menua, tingkat pendidikan petani juga amat rendah, sebanyak 72,6% petani hanya berpendidikan sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar (BPS, 2013). Usia yang tua dan pendidikan petani yang rendah akan memperlambat laju adopsi terhadap teknologi dan inovasi-inovasi di sektor pertanian.

Rekomendasi

Keberhasilan korporasi petani akan bergantung pada kemampuan Presiden mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Saya mengusulkan beberapa hal penting guna keberhasilan implementasi korporasi petani ini; pertama, perlu dibuat tim lintas kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mempelajari pikiran dan kegagalan implementasi model "korporasi petani" pada era pemerintahan sebelumnya. Sehingga kelemahan

dan kekurangan yang ada akan menjadi pelajaran penting bagi penguatan implementasi gagasan korporasi petani di era sekarang. Kedua, riset yang serius perlu dilakukan untuk mencari model terbaik implementasi korporasi petani. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi perlu dilibatkan dalam hal ini. Ketiga peran penyuluhan perlu direvitalisasi dan diperkuat. Penyuluh bukan lagi fokus pada sektor *on-farm* semata tetapi juga mesti bisa masuk pada sektor *of-farm* dari usaha tani termasuk mendekati petani dan proses penyuluhan pada teknologi informasi yang terus berkembang. Peran penyuluh akan menjadi penting mengingat tantangan sumberdaya manusia petani yang sudah tua dan berpendidikan rendah memerlukan peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan perilaku usaha tani yang mampu beradaptasi dengan pola korporasi petani. Terakhir, ujian terberat Presiden Jokowi dalam mewujudkan korporasi petani adalah memastikan komitmen segenap jajaran pemerintahannya dari pusat hingga daerah tetap tegak lurus pada kepentingan petani. Misi mensejahterakan petani tidak boleh dikalahkan oleh *interest-interest* sempit yang akan muncul di tengah jalan. Presiden mesti memastikan bahwa ini adalah pekerjaan yang dikawal dengan idealisme. Pendekatan korporasi petani sebagai "proyek" semata harus dijauhan. Keuntungan dan nilai tambah adalah untuk petani semata. Tidak boleh ada penunggang gelap di tengah jalan yang mencoba meraup keuntungan dan pada akhirnya meninggalkan petani. Kita butuh lebih dari seorang pemimpin. Kita memerlukan negarawan-negarawan untuk proyek kesejahteraan petani ini. Dengan demikian korporasi petani yang inklusif akan dapat kita wujudkan. (*)